

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pembangunan politik jarang dilihat dalam memahami masalah pembangunan secara langsung. Penelitian ini melihat dalam perspektif yang berbeda. Pembangunan politik tidak hanya dapat dilihat dalam konteks fondasi bagaimana membangun demokrasi. Namun, dalam konteks yang lebih empiris, konsep pembangunan politik dapat menjelaskan mengapa pelaksanaan pembangunan pada sebuah negara atau daerah bermasalah. Aspek tersebut menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian yang dilakukan ini

Berdasarkan temuan lapangan yang telah diperoleh dan dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa isu pembangunan di Kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Menggunakan kerangka pembangunan politik oleh Huntington yang menyatakan empat ciri dasar pembangunan politik, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokratisasi dan mobilisasi, penelitian ini menemukan bahwa di Kota Bukittinggi ciri-ciri pembangunan tersebut masih memiliki kelemahan dalam implementasinya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembangunan memunculkan berbagai persoalan, seperti penolakan masyarakat, lemahnya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang belum optimal.

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal pembangunan sudah melakukan prosedur formal, seperti melakukan Musrenbang, penyusunan RPJMD, serta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan melaksanakan rapat paripurna. Selain itu seluruh pemangku kepentingan juga turut dilibatkan dalam setiap prosesnya serta adanya pertimbangan-pertimbangan terhadap nilai dan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Isu muncul ketika terjadi kesenjangan antara prosedur formal dengan praktik yang terjadi secara langsung di lapangan. Prosedur formal yang dilakukan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan formalitas, bukan sebagai proses yang menghasilkan kebijakan yang secara langsung memenuhi yang nyata dari masyarakat.

Pada aspek rasionalisasi, pengambilan keputusan di Kota Bukittinggi masih dipengaruhi oleh kepentingan dan preferensi aktor sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada aspek integrasi, keterlibatan tokoh adat, masyarakat dan berbagai unsur lainnya merupakan hal yang penting untuk ditekankan. Namun pemerintah belum mampu membangun kesepahaman di antara berbagai kelompok masyarakat, sehingga persoalan integrasi di Kota Bukittinggi muncul di berbagai lapisan, yaitu antara pemerintah dan tokoh adat, di lapisan internal struktur adat itu sendiri, dan lapisan masyarakat. Adanya prinsip "*wak paiyoan, wak pasamoan*" dalam budaya Minangkabau menunjukkan bahwa musyawarah dan mufakat merupakan satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam siklus kebijakan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, dalam aspek demokratisasi pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk mewadahi partisipasi masyarakat di Kota Bukittinggi, seperti membentuk website yang berisi pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi, melakukan audiensi Rapat Dengar Pendapat (RDP), menyediakan layanan berupa nomor telepon, dll. Namun penelitian ini menemukan bahwa rantai komunikasi antara pemerintah kota ke masyarakat tidak berjalan secara efektif dan tidak disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kota Bukittinggi itu sendiri, sehingga informasi tidak sampai dengan cepat dan tepat ke masyarakat namun dari *mulut ke mulut* dan melalui media sosial. Pada dimensi terakhir yaitu mobilisasi, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Bukittinggi masih bersifat reaktif. Artinya gejolak dalam masyarakat baru akan muncul setelah kebijakan terasa langsung dan berdampak bagi mereka. Selain itu, keterwakilan masyarakat melalui DPRD belum sepenuhnya mampu mengimbangi kuatnya kepentingan eksekutif. Kondisi yang demikian menyebabkan lembaga politik belum mampu mengelola tuntutan masyarakat secara efektif, berpegang pada aturan, dan menghasilkan kebijakan yang dapat diterima masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa akar penyebab munculnya masalah pembangunan di Kota Bukittinggi adalah karena belum optimalnya pembangunan politik dan rendahnya institusionalisasi politik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kesenjangan antara aturan formal dengan praktiknya menyebabkan pembangunan yang telah melewati proses formal dan memenuhi syarat secara

administratif namun belum sepenuhnya mendapat dukungan dan memenuhi kebutuhan nyata dari masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga kepada kemampuan institusi politik untuk dapat mengelola, menyatukan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sehingga institusi politik yang ada harus memiliki kapasitas untuk menjadi adaptif, kompleks, otonom dan koheren

Oleh karena itu hal ini perlu menjadi perhatian, karena sesuai dengan gambaran Huntington bahwa selama institusi dalam sistem politik belum cukup mampu untuk mengimbangi tuntutan partisipasi masyarakat yang tinggi, maka akan muncul ketimpangan yang harus diatasi dengan penguatan institusionalisasi. Apabila hal tersebut tidak segera dibenahi, maka pola dan isu yang serupa akan terus terjadi.

## 6.2 Saran

Adapun beberapa saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat institusionalisasi politik dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap program yang dibentuk mengacu kepada apa yang tertuang dalam RPJMD dan telah melalui proses perencanaan yang seharusnya dan sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat.
2. Legislatif diharapkan dapat menjembatani kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat dan memastikan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah mengundang semua *stakeholder* yang relevan. Sehingga

informasi dapat diperoleh oleh semua pihak secara luas dan merata, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik.

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan kajian menggunakan perspektif teori lain atau melakukan kajian perbandingan dengan daerah yang memiliki karakteristik berbeda.

